

INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Firman Akbar ¹, Ali Rizky ², Kamaruddin ³

^{1,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

²Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

Correspondence author: firman2322@gmail.com

Kendari, Indonesia

Abstract

The influence of public opinion and "trial by social media" on the law enforcement process in Indonesia using a normative and empirical approach. The introduction explains the background to the importance of understanding the impact of social media on the law. Research methods involve statutory studies, legal cases, and literature studies, as well as collecting primary data through interviews and focus group discussions. This research found that netizen intervention had a positive influence, such as increasing community participation, empowering information, and promoting justice. However, negative challenges and impacts are also significant, including the spread of misinformation, political and legal discrimination, and the manipulation of personal interests. Furthermore, "trial by social media" affects legal independence through increased public pressure, influence on public perception, dissemination of inaccurate information, decreased public trust, manipulation by certain groups, and obstruction of effective legal processes.

Keywords: Law Enforcement; Netizen Intervention

Abstrak

Pengaruh opini publik dan "trial by social media" terhadap proses penegakan hukum di Indonesia dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendahuluan menjelaskan latar belakang pentingnya memahami dampak media sosial terhadap hukum. Metode penelitian melibatkan kajian undang-undang, kasus hukum, dan studi pustaka, serta pengumpulan data primer melalui wawancara dan diskusi kelompok fokus. Penelitian ini menemukan bahwa intervensi netizen memiliki pengaruh positif, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan informasi, dan mendorong keadilan. Namun, tantangan dan dampak negatif juga signifikan, termasuk penyebaran informasi salah, politik dan diskriminasi hukum, serta manipulasi kepentingan pribadi. Selanjutnya, "trial by social media" mempengaruhi independensi hukum melalui tekanan publik yang meningkat, pengaruh pada persepsi publik, penyebaran informasi yang tidak akurat, penurunan kepercayaan publik, manipulasi oleh kelompok tertentu, dan penghambatan proses hukum yang efektif.

Kata Kunci: Intervensi Netizen; Penegakan Hukum

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. (Basuki, et al. 2022). Di Indonesia, kehadiran netizen yang aktif menggunakan media sosial dan platform digital lainnya, telah mempengaruhi proses hukum dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana opini publik dapat membentuk, mempengaruhi, bahkan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.



Netizen, atau warga internet, memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk opini publik. (Madrah, et al. 2018). Dengan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, netizen dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu hukum tertentu. Dalam beberapa kasus, intervensi netizen telah mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus yang mendapat sorotan media sosial, di mana tekanan dari netizen dapat mempercepat proses penegakan hukum. intervensi netizen dalam proses hukum juga memiliki sisi negatif. (Jati, et al. 2019). Tidak jarang opini yang berkembang di media sosial bersifat emosional dan tidak berdasarkan fakta yang lengkap. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan bahkan mempengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum. Tekanan publik yang besar melalui media sosial dapat menimbulkan bias dan mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan objektif dan berdasarkan bukti.

Studi kasus mengenai intervensi opini publik dalam proses hukum di Indonesia menunjukkan beberapa contoh konkret di mana netizen memainkan peran penting. Misalnya, Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso, yang mengakibatkan matinya Mirna wayan solihin, (metro.tempo.com) Kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy yang pada akhirnya Mario Dandy Divonis 12 Tahun penjara, (news.detik.com) Kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, (www.beritasatu.com) Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba yang di enjara Seumur Hidup, dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang dalam perkembangannya tidak lepas dari perhatian dan pengaruh warga netizen yang dapat mempengaruhi penanganan kasus oleh pihak berwenang, walaupun di sisi lain, terdapat juga kasus dimana intervensi netizen justru memperkeruh situasi dan menghambat penegakan hukum yang adil.

Selain itu, fenomena "*Trial by Social Media*" menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan di Indonesia. Ketika suatu kasus mendapat perhatian besar dari netizen, proses pengadilan sering kali berjalan di bawah bayang-bayang opini publik yang terbentuk di media sosial. Ini dapat mempengaruhi independensi pengadilan dan memunculkan kekhawatiran tentang keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memiliki peran penting dalam memantau dan mengawal proses penegakan hukum. (Sudirman, 2023: 16). Namun, diperlukan keseimbangan agar intervensi netizen tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar keadilan dan proses hukum yang adil. Pendidikan dan literasi digital menjadi kunci dalam membangun netizen yang kritis dan bertanggung jawab, (Alya, et al. 2023) sehingga dapat berkontribusi positif dalam penegakan hukum tanpa menimbulkan distorsi informasi.

Memperhatikan dinamika dan implikasi dari intervensi netizen, penelitian ini juga akan mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini penting agar netizen dapat berperan secara konstruktif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan proses hukum yang adil. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti peran media dalam membentuk opini publik dan bagaimana media dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan informasi yang akurat dan berimbang. Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam mengelola dampak dari intervensi netizen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengelola pengaruh netizen dalam penegakan hukum di Indonesia, serta menawarkan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan.

METODE

Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normative dan empiris untuk menganalisis pengaruh opini publik dan "*trial by social media*" terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan normatif mencakup kajian undang-undang, kasus, hukum, dan perkembangan historis yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan diskusi kelompok fokus, serta data sekunder dari studi Pustaka dan analisis media. Hasil analisis kualitatif dan kuantitatif akan digunakan untuk mengevaluasi dampak pengaruh media sosial terhadap proses hukum dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan mengenai intervensi opini publik oleh netizen di Indonesia yang memiliki dampak Positif dan tantangan, serta dampak negatif yang signifikan terhadap proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, netizen berperan sebagai pengawas dan pengontrol, yang mempengaruhi kebijakan dan Tindakan hukum melalui *platform* media sosial.

Pengaruh Positif Intervensi Opini Publik oleh Netizen Partisipasi Masyarakat

Opini publik yang disampaikan melalui media sosial memberikan peluang signifikan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses hukum. (Taryana, et al. 2023). *Platform* digital memungkinkan netizen untuk menyebarluaskan informasi, membagikan pendapat, dan berdiskusi tentang berbagai isu hukum yang sedang berlangsung. Dengan adanya keterlibatan ini, masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan berperan aktif dalam memengaruhi jalannya proses hukum. Keterlibatan publik yang meningkat melalui media sosial menciptakan tekanan yang signifikan pada aparat penegak hukum. Ketika

kasus-kasus tertentu menjadi viral dan mendapatkan perhatian luas di media sosial, aparat penegak hukum merasa tertekan untuk bertindak lebih cepat dan transparan. Tekanan ini sering kali mendorong mereka untuk memberikan pembaruan secara rutin dan menjelaskan keputusan serta tindakan mereka secara lebih rinci kepada publik.

Transparansi dalam penegakan hukum menjadi lebih penting ketika masyarakat aktif memantau dan mengevaluasi proses hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk melaporkan ketidakadilan atau kekurangan dalam proses hukum, yang kemudian dapat memaksa aparat penegak hukum untuk memperbaiki kekurangan tersebut. (Nursiman, et al.2022). Transparansi ini juga membantu memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan tidak ada tindakan yang tersembunyi dari publik. Akuntabilitas adalah aspek penting lainnya yang diperoleh dari keterlibatan publik di media sosial. Aparat penegak hukum harus menjelaskan keputusan mereka secara terbuka kepada masyarakat, karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil dapat langsung dipantau dan dikritik. Hal ini mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak dengan hati-hati dan memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Namun, meskipun partisipasi publik melalui media sosial membawa dampak positif, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Opini publik di media sosial sering kali bersifat emosional dan tidak selalu didasarkan pada fakta yang lengkap. (Habibie, et al. 2018). Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan menciptakan persepsi yang bias terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Ketika kasus-kasus hukum mendapatkan perhatian besar di media sosial, proses hukum dapat terpengaruh oleh opini publik yang terbentuk di platform digital. (Juditha, et al.2018). Hal ini dapat menciptakan tekanan pada aparat penegak hukum untuk membuat keputusan yang populer, alih-alih yang berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan memahami cara memproses informasi dengan kritis. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan proses hukum dan keputusan mereka kepada publik. Ini akan membantu mengurangi potensi bias dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan relevan.

Pemberdayaan Informasi

Dengan kemudahan akses informasi yang ditawarkan oleh teknologi digital, masyarakat kini dapat memperoleh dan menyebarkan informasi terkait kasus hukum dengan lebih cepat dan efisien. Media sosial, situs berita online, dan platform komunikasi lainnya memungkinkan netizen untuk mengakses berita dan perkembangan terkini dari berbagai sumber secara *real-time*. (Prajarto, et al. 2019). Akses ini tidak hanya

mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi data dan opini mengenai kasus hukum yang sedang berlangsung. Kemudahan akses ini dapat mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat. Ketika informasi mengenai kasus hukum cepat tersebar dan mendapatkan perhatian publik, pihak berwenang sering kali merasa terdorong untuk segera merespons dan menyelesaikan kasus tersebut. Tekanan dari masyarakat dan media dapat mempercepat proses investigasi dan penanganan kasus, karena aparat penegak hukum menyadari bahwa kinerja mereka sedang diawasi secara ketat oleh publik.

kemudahan akses informasi juga membawa risiko potensial, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. (Fahrudin, et al.2023). Dalam beberapa kasus, informasi yang tidak tervalidasi dapat menyebar luas dan mempengaruhi persepsi publik tentang kasus hukum. Hal ini dapat menciptakan tekanan yang tidak proporsional pada aparat penegak hukum dan mempengaruhi keputusan yang diambil, terutama jika opini publik sangat terpolarisasi. Dalam menghadapi risiko ini, penting bagi masyarakat untuk menjadi konsumen informasi yang kritis. Mengedukasi publik tentang cara memverifikasi sumber informasi dan membedakan antara berita yang akurat dan yang palsu dapat membantu mengurangi dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar.¹⁵ Pemerintah dan organisasi terkait juga dapat berperan dengan memberikan klarifikasi dan informasi yang akurat tentang kasus-kasus hukum yang mendapat perhatian publik.

Kemudahan akses informasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam penegakan hukum. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya, diperlukan upaya kolaboratif antara masyarakat, media, dan aparat penegak hukum. Dengan cara ini, informasi dapat disebarluaskan dengan cara yang mendukung keadilan dan transparansi tanpa mengorbankan integritas proses hukum.

Mendorong Keadilan

Kontrol masyarakat melalui media sosial memiliki potensi yang signifikan dalam mencapai keadilan substantif, di mana suara publik dapat memainkan peran kunci dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Platform media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, mengungkapkan ketidakpuasan, dan menuntut perubahan dalam sistem hukum secara lebih efektif dan luas dibandingkan sebelumnya. (Kuncoro, et al. 2023). Ketika masyarakat mengamati adanya ketidakadilan atau diskriminasi dalam proses hukum, media sosial menjadi saluran utama untuk menyuarakan protes dan mendesak aparat penegak hukum agar bertindak dengan lebih adil. Kampanye online, petisi, dan diskusi publik dapat memperluas cakupan perhatian terhadap isu-isu yang mungkin terabaikan oleh media tradisional atau aparat penegak hukum.

Tekanan publik yang dihasilkan melalui media sosial sering kali menuntut agar aparat penegak hukum lebih responsif terhadap isu-isu ketidakadilan. (Sudirman, Lu, 2023). Misalnya, kasus-kasus yang mendapatkan sorotan luas di media sosial sering kali mengalami percepatan dalam penanganannya, karena aparat penegak hukum merasakan tekanan untuk merespons dengan tindakan yang sesuai. Ini dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Selain itu, media sosial juga memberikan platform bagi kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka dan menuntut perlakuan yang setara. Suara dari kelompok minoritas atau yang kurang beruntung dapat memperoleh perhatian yang lebih luas melalui media sosial, memungkinkan mereka untuk menyampaikan pengalaman dan tuntutan mereka dalam konteks hukum. Dengan cara ini, kontrol masyarakat melalui media sosial membantu mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam penegakan hukum. (Al Mustaqim, et al. 2024). Kontrol masyarakat melalui media sosial juga membawa risiko tertentu. (Wulandari, et al. 2021).

Opini publik yang berkembang di media sosial tidak selalu berdasarkan pada fakta yang lengkap atau analisis mendalam. Terkadang, informasi yang disebarkan bisa bersifat emosional atau tidak akurat, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak adil atau berdampak negatif pada pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempraktikkan literasi digital dan kritis dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Sementara media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk menuntut keadilan, informasi yang disampaikan harus diverifikasi dan didasarkan pada bukti yang kuat untuk menghindari distorsi dan penyebaran informasi yang salah.

Tantangan dan Dampak Negatif Penyebaran Informasi yang Salah

Meskipun intervensi netizen dalam proses hukum memiliki manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terdapat juga risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko utama adalah penyebaran informasi yang keliru atau provokatif di media sosial, yang dapat merugikan individu yang terlibat dalam proses hukum. (Jati, et al. 2019). Informasi yang tidak akurat atau bias yang menyebar luas dapat menyebabkan berbagai masalah, baik bagi individu yang terlibat dalam kasus hukum maupun bagi sistem hukum itu sendiri. Penyebaran informasi yang keliru di media sosial sering kali memicu opini publik yang terdistorsi dan emosional. Ketika netizen membagikan atau memperdebatkan informasi yang tidak sepenuhnya benar, hal ini dapat menciptakan tekanan yang tidak proporsional pada aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan pandangan publik, bukan berdasarkan fakta atau hukum yang berlaku. Ini bisa

mengakibatkan keputusan hukum yang dipengaruhi oleh opini publik yang tidak objektif, yang dapat merusak keadilan dalam proses hukum.

Informasi provokatif atau sensasional yang disebarluaskan di media sosial juga dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional individu yang terlibat dalam proses hukum.²¹ Misalnya, penyebaran informasi pribadi atau identitas pelaku dan korban dapat menyebabkan pelanggaran hak privasi dan perlakuan yang tidak adil. Individu yang terlibat dalam kasus hukum dapat mengalami stigma sosial, ancaman, bahkan kekerasan sebagai akibat dari informasi yang salah atau provokatif yang tersebar luas. Selain itu, media sosial sering kali memberikan platform bagi komentar-komentar yang bersifat prejudis dan diskriminatif. Ketika publik terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat, mereka mungkin membuat penilaian dan komentar yang bias tentang individu yang terlibat, baik itu pelaku atau korban.²² Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik tentang kasus tersebut dan berpotensi mempengaruhi proses hukum secara negatif, merusak hak individu untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Untuk memitigasi risiko ini, penting bagi netizen untuk mempraktikkan literasi digital dan kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi dan sebar. Verifikasi fakta dan sumber informasi sebelum membagikannya dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang keliru. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu meningkatkan komunikasi yang transparan dan akurat untuk mengurangi dampak negatif dari informasi yang salah. Penting juga bagi lembaga- lembaga hukum untuk mempertimbangkan mekanisme perlindungan hak-hak individu dalam menghadapi pengaruh dari media sosial. Misalnya, perlindungan privasi dan larangan penyebaran informasi sensitif dapat membantu menjaga integritas proses hukum dan hak-hak konstitusional individu yang berperkara. Meskipun intervensi netizen dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, perlu diwaspadai bahwa penyebaran informasi yang keliru atau provokatif dapat merugikan individu dan mengganggu proses hukum. Memastikan bahwa informasi yang beredar adalah akurat dan bahwa hak-hak individu tetap dihormati adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam sistem hukum di era digital.

Politik dan Diskriminasi Hukum

Intervensi politik oleh kelompok tertentu dapat menjadi ancaman serius bagi penegakan hukum yang adil.²³ Ketika politisi atau kelompok dengan kekuatan politik mencoba memanipulasi opini publik untuk melindungi diri dari proses hukum, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan yang merusak integritas sistem hukum. Politisi sering kali memiliki akses dan pengaruh yang luas melalui media massa dan media sosial untuk membentuk opini publik. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menggunakan kekuatan ini untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang merugikan mereka atau untuk

membentuk narasi yang menguntungkan posisi mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari akuntabilitas dan memanipulasi proses hukum agar tidak mengarah pada tindakan hukum yang sebenarnya diperlukan.

Manipulasi opini publik ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Ketika kasus-kasus melibatkan individu dengan kekuasaan politik, keputusan hukum sering kali menjadi terdistorsi karena adanya tekanan dari luar sistem hukum itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil, di mana individu yang seharusnya bertanggung jawab tidak mendapatkan hukuman yang sesuai atau proses hukum menjadi terhambat oleh intervensi politik. (Aliano, et al. 2023). Ketidakadilan ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh politik dan opini publik yang dibentuk secara artifisial, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada integritas dan objektivitas sistem hukum. Kepercayaan publik yang rendah dapat mengurangi efektivitas sistem hukum dan menimbulkan skeptisisme tentang keadilan proses hukum. Untuk mengatasi ancaman ini, penting bagi sistem hukum untuk menjaga independensinya dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti dan prinsip-prinsip keadilan, bukan pada tekanan politik atau opini publik. Aparat penegak hukum harus memiliki mekanisme perlindungan terhadap intervensi politik, dan proses hukum harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap informasi yang disebarkan oleh politisi dan kelompok dengan kepentingan politik. Edukasi publik mengenai literasi politik dan pemahaman tentang bagaimana opini publik dapat dimanipulasi akan membantu mengurangi dampak negatif dari intervensi politik dalam penegakan hukum. (Alaydrus, et al. 2023). Intervensi politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu dapat merusak proses penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan. Memastikan bahwa sistem hukum tetap independen dan transparan, serta meningkatkan masyarakat tentang potensi manipulasi politik, adalah langkah penting untuk menjaga keadilan dan integritas dalam penegakan hukum.

Keentingan Pribadi dan Manipulasi

Dalam beberapa kasus, opini publik yang dibentuk oleh netizen dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu (Watie, et al. 2024), yang berpotensi mengaburkan objektivitas dalam penegakan hukum. Fenomena ini terjadi ketika informasi yang disebarluaskan di media sosial tidak hanya dipengaruhi oleh fakta, tetapi juga oleh agenda-agenda tertentu yang ingin diimplementasikan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan politik atau ekonomi. Ketika opini publik dipengaruhi oleh kepentingan politik, politisi atau kelompok politik mungkin berusaha membentuk narasi yang sesuai dengan

agenda mereka. Misalnya, mereka dapat memanipulasi informasi atau mengarahkan diskusi publik untuk menciptakan tekanan terhadap aparat penegak hukum agar mereka bertindak sesuai dengan kepentingan politik tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak objektif dan bias, karena keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan bukan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang sebenarnya.

Kepentingan ekonomi juga dapat mempengaruhi opini publik. (Dwita, et al. 2104). Perusahaan atau individu dengan kepentingan bisnis yang besar dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan posisi mereka atau merusak reputasi lawan mereka. Dalam kasus hukum yang melibatkan isu-isu ekonomi atau korporasi, informasi yang dikendalikan oleh kepentingan bisnis bisa membentuk persepsi publik dengan cara yang merugikan proses hukum yang adil dan objektif. Selain itu, keberadaan filter *echo chamber* di mana individu cenderung terpapar hanya pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri juga memperburuk masalah ini. (Fadhillah, et al. 2023). Ketika opini publik dibentuk dalam ruang lingkup yang sempit dan tidak memperhatikan sudut pandang lain, hal ini dapat menyebabkan persepsi yang sangat bias tentang kasus hukum. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi terpengaruh oleh pandangan yang tidak seimbang dan bisa mengabaikan fakta-fakta penting yang mungkin tidak sesuai dengan narasi dominan.

Pengaruh ini sering kali mengaburkan objektivitas penegakan hukum dan dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil. Ketika tekanan publik yang dibentuk oleh kepentingan tertentu menjadi terlalu kuat, aparat penegak hukum mungkin merasa terpaksa untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan opini publik yang dominan, meskipun hal tersebut tidak selalu berdasarkan pada bukti atau prinsip hukum yang adil. Untuk memitigasi dampak negatif dari pengaruh tersebut, penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami dinamika di balik pembentukan opini publik. Edukasi mengenai literasi media dan politik dapat membantu individu menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan memahami potensi bias yang mungkin mempengaruhi opini mereka. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menjaga independensi dan integritas dalam proses hukum, dengan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan pada bukti dan prinsip hukum yang objektif, bukan pada tekanan atau agenda yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Pengaruh “Trial by Social Media” terhadap Independensi Hukum

“*Trial by Social Media*” atau pengadilan oleh media sosial merujuk pada situasi di mana kasus hukum mendapatkan penilaian publik yang signifikan di platform media sosial sebelum proses hukum resmi berlangsung. Fenomena ini dapat mempengaruhi

independensi dan objektivitas aparat penegak hukum di Indonesia dengan cara-cara berikut :

1. Tekanan Publik yang Meningkat

Media sosial sering kali menyebarkan informasi tentang kasus hukum dengan kecepatan dan jangkauan yang luas, menciptakan tekanan publik yang signifikan terhadap aparat penegak hukum. (Indrawan, et al. 2020). Dalam konteks ini, ketika opini publik sudah terpolarisasi atau dipenuhi dengan emosi, aparat penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan ekspektasi publik, bukan berdasarkan pada fakta dan bukti yang objektif. Tekanan ini dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas secara adil. Ketika kasus hukum mendapatkan perhatian besar di media sosial, opini publik bisa terbentuk dengan cepat dan sering kali dengan nuansa yang kuat, baik positif maupun negatif. Jika opini publik sangat mendukung atau menentang seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum mungkin merasakan dorongan untuk bertindak sesuai dengan pandangan mayoritas, untuk menghindari kritik atau demonstrasi publik yang dapat mengganggu kerja mereka (Annas, et al. 2019).

Perasaan tertekan ini dapat mengakibatkan penegak hukum membuat keputusan yang lebih mengutamakan respons terhadap tekanan publik daripada berdasarkan analisis mendalam terhadap bukti dan fakta yang ada. Sebagai contoh, mereka mungkin merasa harus mempercepat proses hukum atau mengambil tindakan yang lebih keras untuk menunjukkan bahwa mereka "mengambil tindakan" sesuai dengan tuntutan masyarakat, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya berdasarkan pada evaluasi hukum yang objektif. Dalam situasi di mana opini publik sangat emosional, misalnya ketika kasus melibatkan elemen sensasional atau kontroversial, tekanan untuk memenuhi harapan publik bisa menjadi sangat kuat. Ini bisa mengarah pada keputusan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak hukum individu atau prinsip keadilan yang seharusnya. Tekanan dari opini publik yang emosional dapat menyebabkan aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tidak seimbang atau tidak adil, untuk menenangkan keresahan publik. (Atika, et al. 2019).

Untuk menjaga independensi dalam penegakan hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas, meskipun menghadapi tekanan dari media sosial. Mereka harus mampu memisahkan keputusan hukum dari pengaruh eksternal dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan hukum yang berlaku. Penting juga bagi masyarakat untuk memahami peran dan batasan dari proses hukum dan untuk menghargai pentingnya keputusan yang adil dan objektif. Dengan cara ini, pengaruh media sosial dapat dikelola dengan lebih

baik, dan independensi penegakan hukum dapat dipertahankan, sehingga sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil.

2. Pengaruh pada Persepsi Publik

"*Trial by Social Media*" dapat membentuk persepsi publik tentang kasus hukum sebelum proses resmi dimulai, yang berdampak signifikan pada bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus tersebut.³² Ketika media sosial mengangkat sebuah kasus dan menciptakan narasi publik yang kuat, hal ini dapat mempengaruhi cara aparat penegak hukum memperlakukan kasus tersebut di setiap tahap proses hukum, dari penyelidikan hingga penuntutan dan peradilan. Ketika publik sudah membentuk pendapat yang kuat tentang seorang tersangka atau kasus tertentu, hal ini sering kali disertai dengan tekanan untuk mengadopsi pandangan tersebut. Misalnya, jika media sosial secara luas mengkritik atau mendukung tersangka sebelum proses hukum dimulai, aparat penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan opini publik tersebut. Tekanan ini dapat muncul dalam bentuk tuntutan untuk mempercepat proses hukum, mengubah arah penyelidikan, atau membuat keputusan yang lebih cenderung untuk memenuhi harapan publik daripada berfokus pada bukti yang ada.

Persepsi publik yang terbentuk melalui "*Trial by Social Media*" juga dapat mempengaruhi keputusan dalam proses penyelidikan. Misalnya, aparat penegak hukum mungkin merasa bahwa mereka perlu lebih hati-hati atau lebih agresif dalam penyelidikan untuk membenarkan keputusan mereka di hadapan opini publik. Ini dapat menyebabkan penyelidikan menjadi kurang objektif, karena pihak berwenang mungkin merasa harus menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi ekspektasi publik daripada berdasarkan pada fakta dan bukti yang murni. (Eliot, et al. 2016). Dalam tahap penuntutan, persepsi publik yang telah terbentuk dapat menyebabkan jaksa merasa tertekan untuk mengejar tuntutan yang lebih berat atau melakukan pendekatan yang lebih dramatis, meskipun hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh bukti yang ada. Tekanan untuk mengikuti apa yang dianggap sebagai kehendak publik dapat mengakibatkan keputusan yang kurang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang obyektif.

Selama proses peradilan, opini publik yang kuat dapat mempengaruhi bagaimana hakim dan juri melihat kasus tersebut. Meskipun idealnya hakim dan juri harus memutuskan kasus berdasarkan pada bukti dan hukum, tekanan publik dapat mengganggu proses ini. Opini publik yang kuat dapat menciptakan ketegangan dalam ruang sidang dan mempengaruhi persepsi tentang keadilan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keputusan akhir yang diambil oleh pengadilan. "*Trial by Social Media*" dapat merusak objektivitas proses hukum dengan mempengaruhi bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus dan keputusan yang diambil sepanjang proses. Untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap fokus pada

prinsip-prinsip hukum dan bukti yang ada, serta memastikan bahwa keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh opini publik yang mungkin terdistorsi oleh media sosial. (Hajad, et al. 2018).

3. Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat

Media sosial sering kali menjadi platform untuk penyebaran informasi yang tidak diverifikasi atau bahkan salah, yang dapat memengaruhi proses hukum dengan cara yang merugikan. Informasi yang keliru atau sensasional ini sering kali mendapat perhatian luas dan dapat memicu reaksi publik yang tidak proporsional. (Adila, et al. 2019). Reaksi tersebut dapat menambah tekanan pada aparat penegak hukum untuk merespons dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan. Ketika informasi yang salah atau menyesatkan disebarluaskan melalui media sosial, publik sering kali terpengaruh oleh narasi yang tidak akurat, yang bisa memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan atau kekhawatiran.

Informasi yang keliru dapat menciptakan persepsi yang salah tentang fakta-fakta kasus atau individu yang terlibat. Misalnya, berita yang salah tentang seseorang yang terlibat dalam kasus hukum bisa membuat publik memandang individu tersebut secara negatif sebelum proses hukum dimulai. Tekanan untuk memenuhi harapan publik yang telah dipengaruhi oleh informasi salah ini dapat memengaruhi bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas mereka, dan bahkan mengubah arah atau intensitas penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, penyebaran informasi sensasional sering kali memperburuk situasi dengan menambah ketegangan dan kontroversi. Ketika kasus hukum menjadi pusat perhatian publik karena informasi yang tidak akurat, aparat penegak hukum mungkin merasa bahwa mereka harus merespons dengan cara yang lebih dramatis untuk membuktikan bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Ini bisa mengarah pada keputusan hukum yang lebih dipengaruhi oleh opini publik yang tidak berimbang daripada berdasarkan analisis hukum yang obyektif dan berbasis bukti.

Untuk mengurangi dampak negatif dari informasi yang keliru atau sensasional di media sosial, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan integritas. Meskipun media sosial menyediakan platform untuk diskusi dan partisipasi publik, tantangan yang timbul dari penyebaran informasi yang tidak diverifikasi atau salah dapat mempengaruhi proses hukum dengan cara yang signifikan. (Fahrudin, et al. 2024).

4. Kehilangan Kepercayaan Publik

Ketika aparat penegak hukum terlihat terpengaruh oleh opini publik yang dipicu oleh media sosial, kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas sistem hukum dapat menurun secara signifikan. Opini publik yang kuat dan sering kali emosional, yang berkembang melalui media sosial, dapat menciptakan tekanan yang besar pada aparat

penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan harapan publik, daripada berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan bukti yang ada. (Silooy, et al. 2024). Ketika masyarakat menyaksikan bahwa keputusan hukum tampak dipengaruhi oleh tekanan publik, mereka mungkin mulai meragukan apakah sistem hukum masih mampu memberikan keputusan yang objektif dan adil. Keterlibatan media sosial dalam mempengaruhi keputusan hukum dapat mengaburkan batas antara opini publik dan proses hukum yang seharusnya berdasar pada prinsip-prinsip hukum yang objektif dan tidak bias. Hal ini dapat menyebabkan anggapan bahwa keputusan tidak lagi diambil secara adil atau berdasarkan pada fakta, melainkan lebih pada tekanan eksternal dan persepsi publik.

Penurunan kepercayaan terhadap independensi sistem hukum ini berpotensi mengurangi legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh opini publik yang tidak berimbang atau tidak berdasarkan pada bukti yang solid, mereka mungkin merasa kurang percaya pada proses hukum dan keputusannya. Ini bisa menyebabkan ketidakpuasan yang meluas dan penurunan kepatuhan terhadap hukum, karena masyarakat tidak yakin bahwa sistem hukum akan memberikan perlakuan yang adil atau melindungi hak-hak mereka. Efektivitas sistem hukum juga bisa terpengaruh secara negatif. Ketika keputusan hukum diambil di bawah tekanan opini publik, hal ini bisa mengganggu proses hukum yang adil dan dapat mengarah pada keputusan yang tidak tepat atau tidak konsisten. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak mampu berfungsi secara efektif karena pengaruh luar, maka ini dapat mengurangi kepercayaan dan dukungan mereka terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan. (Simatupang, et al. 2017).

Untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan integritas sistem hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap berkomitmen pada prinsip keadilan dan transparansi. Mereka harus memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan bukti yang kuat dan prinsip hukum yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh opini publik yang mungkin tidak selalu mencerminkan realitas atau keadilan. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses hukum bekerja dan pentingnya menjaga prinsip keadilan dalam sistem hukum. Dengan edukasi yang lebih baik dan transparansi dalam proses hukum, diharapkan kepercayaan publik dapat dipertahankan dan sistem hukum dapat berfungsi dengan lebih efektif dan adil.

5. Manipulasi oleh Kelompok Tertentu

Kelompok atau individu dengan kepentingan tertentu sering kali memanfaatkan media sosial untuk memanipulasi opini publik demi keuntungan agenda mereka atau merusak posisi lawan. Dengan menyebarkan informasi yang mendukung tujuan mereka atau merugikan pihak yang mereka lawan, mereka dapat menciptakan tekanan yang tidak proporsional pada aparat penegak hukum. (Zein, et al. 2019). Manipulasi ini dapat

memiliki dampak signifikan terhadap objektivitas proses hukum dan dapat menyebabkan keputusan yang bias. Media sosial memberikan platform yang luas dan cepat untuk menyebarkan informasi, yang sering kali tidak terverifikasi atau dipilih secara selektif untuk mendukung narasi tertentu. Kelompok dengan agenda tertentu dapat menggunakan media sosial untuk menciptakan kampanye opini publik yang intens, menyebarkan informasi yang menguntungkan posisi mereka atau menjelekkkan lawan mereka. Informasi ini sering kali berbentuk berita palsu, opini yang dipoles, atau data yang dipilih secara selektif untuk mempengaruhi persepsi publik.

Tekanan yang dihasilkan dari manipulasi opini publik ini dapat menjadi sangat kuat. (Nuraliza, et al. 2024). Ketika aparat penegak hukum menghadapi opini publik yang terpolarisasi atau emosional akibat informasi yang dimanipulasi, mereka mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan harapan publik, bukan berdasarkan pada bukti dan prinsip hukum yang objektif. Tekanan ini dapat mengganggu proses hukum yang adil dan merusak objektivitas keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Manipulasi media sosial dapat mengaburkan pemahaman publik tentang fakta dan bukti yang sebenarnya terkait dengan kasus hukum. Ketika informasi yang salah atau bias disebarluaskan secara luas, publik mungkin membentuk opini yang tidak akurat tentang kasus tersebut. Hal ini dapat menciptakan suasana di mana aparat penegak hukum merasa mereka harus bertindak sesuai dengan narasi publik yang salah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan mereka dan menyebabkan ketidakadilan. (Mustika, 2024).

Selain itu, manipulasi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan tertentu atau manipulasi opini publik, mereka mungkin mulai meragukan integritas dan objektivitas sistem hukum. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan proses peradilan dapat menurun, yang dapat mengurangi efektivitas sistem hukum dan mengarah pada ketidakpuasan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan objektivitas mereka dalam menghadapi tekanan publik. Mereka harus memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, bukan terpengaruh oleh manipulasi opini publik. Selain itu, edukasi publik mengenai cara mengenali informasi yang terverifikasi dan memahami proses hukum dapat membantu mengurangi dampak negatif dari manipulasi media sosial.

6. Menghambat Proses Hukum yang Efektif

Fokus pada opini publik dan tekanan media sosial dapat mengalihkan perhatian aparat penegak hukum dari menjalankan proses hukum yang efektif. Ketika aparat

penegak hukum terlalu terfokus pada merespons kritik publik atau membenarkan keputusan mereka di hadapan opini publik yang kuat, mereka mungkin kehilangan fokus pada penyelesaian kasus secara adil dan efisien. (Nurisman, et al. 2022). Tekanan media sosial sering kali menciptakan suasana yang penuh dengan kritik dan tuntutan dari publik. Ketika opini publik terbentuk secara emosional atau terpolarisasi, aparat penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk bertindak cepat dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dalam usaha untuk merespons kritik atau memenuhi tuntutan publik, mereka mungkin mengalihkan perhatian dari tugas utama mereka, yaitu memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan berbasis bukti.

Kebanyakan aparat penegak hukum mungkin merasa bahwa mereka harus menjaga transparansi dan menjelaskan setiap keputusan yang diambil agar tetap mendapatkan dukungan publik. (Usman, et al. 2015). Namun, upaya ini sering kali memakan waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menginvestigasi dan menyelesaikan kasus. Fokus pada pembenaran diri atau merespons kritik media sosial dapat mengganggu alur kerja dan menghambat efektivitas penanganan kasus. Ketika perhatian aparat penegak hukum terbagi antara mengelola persepsi publik dan menjalankan proses hukum, keputusan dalam kasus-kasus hukum mungkin menjadi kurang tajam dan kurang efektif. Misalnya, upaya untuk membenarkan keputusan mereka atau merespons opini publik dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang terpaksa dan tidak didasarkan pada bukti secara menyeluruh. Hal ini bisa mengarah pada penyelesaian kasus yang kurang optimal dan mempengaruhi keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, jika aparat penegak hukum terlalu fokus pada penyesuaian dengan opini publik, mereka mungkin mengabaikan prosedur hukum yang penting atau mengabaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan proses hukum yang adil. (Rahardji, et al. 2010). Keseimbangan antara memenuhi tuntutan publik dan menjaga integritas proses hukum menjadi sulit dicapai ketika tekanan dari media sosial mendominasi perhatian mereka. Untuk memastikan bahwa proses hukum tetap efektif dan adil, penting bagi aparat penegak hukum untuk menjaga jarak dari tekanan publik yang tidak sehat dan fokus pada tugas mereka. Menjaga profesionalisme dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang jelas adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cara yang tepat dan berkeadilan. Selain itu, dukungan sistemik yang memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam mengelola tekanan eksternal dapat membantu menjaga kualitas dan integritas proses hukum.

Melalui pendekatan yang seimbang, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa mereka tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas sambil tetap beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk berkomunikasi secara efektif dengan publik tanpa mengabaikan tugas utama mereka dalam penyelesaian kasus.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa intervensi netizen melalui media sosial memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia, mendorong aparat hukum untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi publik. Meskipun dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tekanan dari opini publik yang sering kali didasarkan pada informasi yang tidak akurat dapat mengganggu proses hukum yang adil dan merusak reputasi individu. Ketergantungan pada opini publik juga berpotensi menurunkan kualitas dan independensi keputusan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara merespons opini publik dan menjalankan proses hukum yang objektif dan adil.

Adapun dari hasil penelitian ini memberikan rekomendasi terhadap Aparat penegak hukum, harus memperkuat prosedur internal mereka untuk memastikan bahwa Keputusan diambil berdasarkan bukti yang solid dan prinsip hukum yang berlaku, bukan terpengaruh oleh tekanan publik. Pelatihan untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekanan eksternal dan strategi manajemen krisis harus diperkenalkan. Ini termasuk memastikan bahwa keputusan hukum tetap didasarkan pada analisis yang objektif dan tidak terdistorsi oleh opini publik atau manipulasi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Isma, Wayan Weda, and Dian Tamitiadini. "Pengembangan model literasi dan informasi berbasis pancasila dalam menangkal hoaks." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18.1 (2019): 101-111.
- Al Mustaqim, Dede, et al. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1.1 (2024): 53-66.
- Alaydrus, Anwar, et al. *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab, 2023.
- Aliano, Yohanes Alfrid, and Mathias Jebaru Adon. "Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6.3 (2023): 474-486.
- Alya, Tiara, et al. "Meninjau Etika Masyarakat Indonesia Dalam Bermedia Sosial Di Masa Pemilu Menggunakan Etika Media Sosial." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1.02 (2023).
- Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, and Asep Aji Pramayoga. "Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial Public Opinion Of Political Polarization On Social Media." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 20.2 (2019): 111.
- Atika, Dhira, Styawati Styawati, and Ahmad Ari Aldino. "Term Frequency-Inverse Document Frequency Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen Opini Masyarakat terhadap Tekanan Mental pada Media Sosial Twitter." *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* 3.4 (2022): 86-97.

- Basuki, Udiyo, and Hendradi Setyawan. "Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2.1 (2022): 1- 22.
- Dwita, Desliana. "Televisi dan kepentingan pemilik modal dalam perspektif teori ekonomi politik media." *Jurnal Ipteks Terapan* 8.4 (2014): 252-261.
- Elliot, Michael. "Trial by social-media: The rise of litigation crowdfunding." *U. Cin. L. Rev.* 84 (2016): 529.
- Erwin, Erwin, et al. *Transformasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fadhillah, Della, et al. "Analisis Fenomenologi Tagar# AnalogSwitchOff terhadap Polarisasi Media Sosial Twitter pada Generasi Z." *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5.2 (2023): 92-101.
- Fahrudin, Atef, and Syamsul Arif Billah. "Modeling Manajemen Informasi dan Verifikasi Berita Menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024: Sebuah Studi Preliminary tentang Upaya Mencegah Black Campaign dan Hoax." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4.2 (2023): 212-232.
- Fahrudin, Atef, and Syamsul Arif Billah. "Modeling Manajemen Informasi dan Verifikasi Berita Menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024: Sebuah Studi Preliminary tentang Upaya Mencegah Black Campaign dan Hoax." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4.2 (2023): 212-232.
- Habibie, Dedi Kusuma. "Dwi fungsi media massa." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7.2 (2018): 79.
- Hajad, Vellayati. "Media Dan Politik (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2.2 (2018).
- Hanifah, Nida Syahla, and Kayus K. Lewoleba. "Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1.4 (2024): 8-8.
- Indrawan, Jerry, and Anwar Ilmar. "Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik." *Medium* 8.1 (2020): 1-17.
- Jati, Makung Ismoyo. "Manajemen Media sebagai Intervensi dalam Menanggulangi Isu Provokatif di Medsos." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13.1 (2019): 14-14.
- Juditha, Christiany. "Hoax communication interactivity in social media and anticipation (Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya)." *Pekommas* 3.1 (2018): 261723.
- Kuncoro, Hestutomo Restu, et al. "Mengurai Ancaman: Sekuritisasi melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial." (2023).
- Madrah, Muna Yastuti, and Mubarak Mubarak. "Netizen dalam Kampanye Pilpres Ri 2014." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7.1 (2018): 16-25.
- Mustika, Rieka. "Etika berkomunikasi di media online dalam menangkal hoax." *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1.2 (2018): 43-50.
- Nuraliza, Vadhea, et al. "Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 4.1 (2024): 245-261.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 170-196.
- Prabowo, Sigit. "Persepsi Mahasiswa Public Relations Terhadap Komunikasi Online Melalui Media Sosial Twitter." *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 15.3 (2016): 234-263.
- Prabowo, Thoriq Tri. *Memperebutkan ruang publik virtual: literasi, hoax, dan perdamaian*. Zahir Publishing, 2020